

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
BADAN USAHA LORONG**
(Suatu Studi di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)

HILMA NURFAHMIATI
Fakultas Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi
Universitas Negeri Makassar
Email: hilmanurfahmiati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilandasi oleh beberapa konsep dan teori yaitu kebijakan publik, implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, dan konsep Badan Usaha Lorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian berjumlah lima orang yang terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan, masyarakat kelompok tani lorong dan pihak kelurahan setempat.

Hasil penelitian antara lain; 1) implementasi sudah berjalan sesuai dengan rel yang telah ditetapkan ditandai dengan adanya partisipasi warga masyarakat pada kegiatan perencanaan, sosialisasi dan pertemuan-pertemuan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan, serta partisipasi pada aktivitas Program BULO; 2) Capaian hasil menunjukkan terjadinya perilaku masyarakat untuk hidup bersih, serta Program BULO dengan budidaya cabai telah membantu masyarakat untuk memproduksi cabai sendiri namun terbatas untuk skala konsumsi rumah tangga saja; 3) Adapun faktor pendukung yaitu adanya agen pelaksana pendukung dari berbagai pihak, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pendukung aktifitas Program BULO telah dimanfaatkan dengan baik. Untuk faktor penghambat yaitu ketergantungan masyarakat terhadap pihak pemerintah yang masih menginginkan pembinaan berulang. Kendala lain dari sisi pembinaan program ini yaitu merubah mindset/ pola pikir masyarakat perkotaan untuk menjadi masyarakat yang mengerti tentang pertanian perkotaan agak berat. Selain itu untuk kasus masyarakat yang komunitasnya agak sibuk hanya menjadikan kegiatan ini sebagai selingan jadi tentunya berdampak kurang bagus terhadap hasil produksi yang dicapai. Faktor cuaca pada musim hujan juga turut menyebabkan budidaya cabai sulit tumbuh dan bertahanan lama.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, Pemberdayaan Masyarakat, Program BULO

PENDAHULUAN

Konsep pada pemberdayaan berkembang karena kebutuhan pada pembangunan alternatif. Sebagai bentuk pembangunan alternatif, pemberdayaan lebih menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat, bersifat *bottom up* dan lokalitas. Hal ini didasari motivasi untuk mengembangkan dan merekonstruksi struktur masyarakat agar menjadi lebih berdaya melalui regulasi yang menekankan prinsip keadilan maupun program implementatif yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Secara konseptual, menurut Edi (2005:58) bahwa pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*, berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya sekelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kebebasan, dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Dengan demikian memberdayakan masyarakat dalam konteks pembangunan berarti melibatkan masyarakat untuk aktif dengan memanfaatkan program-program yang dilakukan oleh pemerintah.

Melalui kepemimpinan Wali Kota Makassar periode tahun 2014-2019 Bapak Ir. Ramdan Pomanto dan

wakilnya Dr. Syamsu Risal, M.Si, menciptakan berbagai kebijakan-kebijakan atau program-program yang dapat mengatasi masalah kemasyarakatan yang ada pada lingkungan. Salah satu masalah terbesar yang ada di Kota Makassar adalah keberadaan lorong yang disebut muara tempat berkumpulnya keterbelakangan. Keberadaan lorong identik dengan kekerasan, dekat dengan kriminalitas, derajat kesehatan rendah, dan tempat menjejalnya berbagai penyakit sosial. Berangkat dari permasalahan tersebut, Wali Kota Makassar menemukan terobosan baru mengubah stigma lorong menjadi gagasan kota dunia melalui beberapa program unggulan pemerintah Kota Makassar, salah satunya melalui Program Badan Usaha Lorong.

pembentukan Badan Usaha Lorong (BULO) dengan mengadopsi sistem operasional koperasi. Program BULO merupakan program lembaga masyarakat yang banyak mengandung makna sosial dan ekonomi dengan tujuan profit, semi profit, dan nirlaba dalam mendukung nilai tambah kesejahteraan masyarakat. Program BULO ini memiliki tujuan utama yaitu mendorong pengembangan sekitar 7.520 lorong menjadi produktif sebagai kelanjutan *masterplan* restorasi lorong di Kota Makassar dengan harapan jika semua lorong menyatu maka akan menjadi pergerakan ekonomi mikro berbasis lorong yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi warga Makassar. Selain itu, program BULO diharapkan mampu membantu

menciptakan pengendalian inflasi sektor konsumsi rumah tangga.

Sejak program BULo di *launching* akhir tahun 2016 pemerintah Kota Makassar giat melakukan sosialisasi dan workshop baik dilingkup pemerintah, SKPD, hingga masyarakat guna menyukseskan pelaksanaan program BULo ini. Gerakan Makassar tanam cabe 10.600 bibit yang dipusatkan di Komplek Griya Tonasa Kecamatan Biringkanaya pada 29 Januari 2017, menjadi momentum dimulainya program BULo dan percepatan pelaksanaan program BULo diseluruh kecamatan yang ada di Kota Makassar. Capaian program BULo dapat dilihat dari panen oleh beberapa kelompok Poktanrong di beberapa lokasi sejak pertengahan 2017. Selain itu, dipuncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) yang berlangsung di Makassar pada bulan Juli 2017, program BULo akan dijadikan sebagai program percontohan nasional sebagai program inovatif.

Namun, dari beberapa capaian program BULo menurut pengamatan peneliti hingga kini diakhir jabatan pemerintahan Wali Kota Makassar, pembenahan lorong belum terealisasi secara merata dan masih banyak lorong yang seharusnya dibenahi belum tersentuh sedikitpun dari kebijakan Wali Kota Makassar ini. Data menunjukkan pada tahun 2016 realisasi program Longgar baru mencapai sekitar 30 % lorong dari 7520 jumlah lorong di Kota Makassar. Dan pada tahun 2017 implementasi program longgar menurut penuturan

Wali Kota Makassar pada peringatan hari jadi Kota Makassar yang ke 410 tahun menuturkan bahwa keberhasilan Longgar sudah mencapai 85 % (Rakyatsulsel.com, 2017). Sedangkan Data dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar mengklaim baru sekitar 500 Kelompok tani BULo yang terbentuk pada tahun 2017. Idealnya dari banyaknya jumlah lorong di Makassar yang mencapai 7520 lorong keberadaan kelompok tani BULo harusnya mencapai 1000-an kelompok yang terbentuk atau setidaknya harus mencapai seperdua dari total jumlah lorong di Makassar agar implemmentasi pemberdayaan masyarakat benar-benar mencapai fungsi awal dibentuknya program tersebut.

Faktor lain penyebab pembenahan lorong belum merata, hal ini bisa disebabkan program BULo tidak memiliki dasar kebijakan yang jelas, sebagaimana belum diaturnya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun peraturan wali kota (Perwali). Dari hal tersebut, dapat dipertanyakan kesiapan aparatur pemerintah akan kesiapannya dalam menjalankan program BULo tersebut. Dalam pandangan lain, keberadaan suatu program sebagai instrumen pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya dapat dilihat dari tinjauan manajemen strategi bahwa program merupakan turunan berkesinambungan dari visi dan misi pemerintah daerah dimana hal tersebut memiliki tujuan sasaran serta kebijakan-kebijakan yang didesain sedemikian rupa sehingga melahirkan

program dan kegiatan, sehingga dapat diasumsikan bahwa keberhasilan program dapat dilihat dari kesinambungan instrumen-instrumen diatas.

Keberadaan program BULO yang tidak memiliki dasar kebijakan yang jelas dikhawatirkan tidak akan terealisasi dengan maksimal dikarenakan ada proses yang tidak berkesinambungan dalam perumusan program yang secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak terhadap pelaksanaan program sebab rantai-rantai proses ini akan membawa visi pada kegiatan nyata dan panduan operasional lapangan untuk aparat pemerintah.

KAJIAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kebijakan (*policy*) sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar, dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Adapun kebijakan yang diterapkan untuk kepentingan masyarakat dalam artian luas (publik) sering disebut kebijakan publik (*public policy*). Menurut Suntoro dan Hasan (2015:2) menjelaskan istilah publik dalam kata kebijakan publik mengandung tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum.

Hal tersebut dilihat dalam dimensi subjek; kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, yang merupakan kebijakan resmi yang mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Dalam dimensi obyek; kebijakan publik merupakan problema atau kepentingan masyarakat. Dalam dimensi lingkungan; kebijakan adalah masyarakat.

Pendapat James E. Anderson sebagaimana dikutip Wilantara dan Susilawati (2016:126) menyatakan bahwa kebijakan publik dikeluarkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun ditegaskan bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Sedangkan David Easton memberikan batasan kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society*, bila diterjemahkan kurang lebih, sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Brian dan Lewis A. Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implementation*) diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius.
2. Untuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber-sumber

- yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
 4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
 5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
 6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
 7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
 8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
 9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
 10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Wahab, 2015:176).

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris, yakni *Empowerment*, yang mempunyai arti pemberian “daya” atau kemampuan sehingga memiliki daya (*power*). Pemberdayaan secara sederhana dikatakan pula sebagai proses sistematis yang memberikan kewenangan, peran, dan fungsi baru agar terjadinya partisipasi yang lebih tinggi pada upaya pencapaian tujuan kelompok (Wilantara dan Susilawati, 2016:119). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk

memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya.

Jim Ife dalam Zubaedi (2013:74-75) bahwa pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya (*empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community*).

Selanjutnya menurut Soetomo (Rakib, 2016:98) menyatakan bahwa pada pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilan serta motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya.

4. Tujuan dan Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan sebuah proses yang berkesinambungan seperti yang dikemukakan oleh Fahrudin (2011:173) bahwa sebuah pemberdayaan berlangsung melalui tujuh tahap program pemberdayaan. Berikut dijelaskan tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

1. Tahap persiapan (*engagement*), dalam tahapan ini yang harus dilakukan adalah persiapan petugas di lapangan. Penyiapan petugas dalam hal ini (*communityworker*) merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan.
2. Tahap pengkajian (*assesment*), yaitu pendefinisian kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki klien.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (*designing*), pada tahap ini diusahakan partisipasi kelompok sasaran untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya.
4. Tahap memformulasikan rencana aksi, pada tahapan ini petugas menulis usulan gagasan kelompok sasaran.
5. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan, pada tahapan ini program yang telah direncanakan dilaksanakan dan harus ada kerjasama antara agen pemberdaya dengan masyarakat.
6. Tahap evaluasi yaitu tahap untuk menilai dan proses pengawasan dari petugas dan masyarakat.

7. Tahap terminasi (*disengagement*), yaitu berakhirnya kegiatan pemberdayaan dan saat dilakukan pemutusan hubungan secara formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian berjumlah lima orang yang terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan, masyarakat kelompok tani lorong dan pihak kelurahan setempat. Penelitian berlangsung dari Bulan Mei-Juni Tahun 2018 di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program BULO

Dalam pelaksanaan Program BULO melalui kegiatan budidaya cabai oleh Poktanrong, agar dapat berjalan baik dan sesuai harapan, maka diperlukan, perencanaan teknik yang tepat dalam pelaksanaannya. Mekanisme pelaksanaan pemberdayaan melalui Program BULO dibagi menjadi 3 tahapan utama yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan pelatihan, tahapan pasca pelatihan.

- a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan pihak dari penyuluh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar melakukan identifikasi calon penerima dan calon lokasi (CP/CL) berkoordinasi dengan Camat dan Lurah untuk memilih kelompok yang memenuhi kriteria yang berupa aspek teknis, aspek administrasi dan aspek lingkungan.

Selanjutnya setelah ditetapkan calon penerima/calon lokasi (CP/CL) Program BULO maka setiap kelompok diidentifikasi apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam aktifitas budidaya cabai selanjutnya diusulkan dalam proposal pengusulan kebutuhan kelompok yang kemudian menjadi salah satu pedoman penyaluran bantuan kepada kelompok oleh Dinas Ketahanan Pangan nantinya.

Selanjutnya dilakukan sosialisasi yang pelaksanaannya sendiri adalah koordinasi persiapan tim tentang teknis pelaksanaan kegiatan beserta tugas masing-masing yang di dalamnya termasuk persiapan materi yang akan diberikan dari tenaga ahli pelatihan, penentuan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan.

b. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Dalam tahapan pelaksanaan dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahap pelatihan budidaya cabai. Dalam kegiatan pelatihan, penyuluh pertanian dari DKP bertanggung jawab dalam memberikan penyuluhan teknis budidaya cabai kepada Poktanrong.

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah pemberian materi pelatihan dasar budidaya cabai sesuai dengan jadwal dan jenis pelatihan yang telah ditetapkan, ini berlangsung selama 2-4 minggu yang dilakukan 2 kali pertemuan dalam seminggu. Pada tahapan ini juga dilakukan pendataan peserta pelatihan melalui absensi anggota kelompok.

Tahapan berikutnya penyaluran bantuan melalui Dinas Ketahanan Pangan. Bantuan sarana dan prasarana meliputi; benih cabe, rak tanaman, polybag kecil, polybag besar, media tanam, pupuk kompos, pupuk npk, pupuk buah, pupuk daun, alat semprot pertanian, dan bahan kimia. Selanjutnya tahapan pelaksanaan budi daya cabai oleh masing-masing kelompok Poktanrong yang telah dibentuk. Disinilah peran penyuluh pertanian bertanggung jawab dalam memberikan penyuluhan secara teknis budidaya, juga menggerakkan kemandirian kelompok agar terlibat secara bersama dan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan kegiatan kelompok.

c. Tahap Pasca Pelatihan

Tahapan pasca pelatihan merupakan tahapan akhir dari kegiatan pelatihan BULO. Tahapan pasca pelatihan dibagi menjadi 2 tahapan yaitu pendampingan pasca pelatihan dan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan. Dalam tahapan

pendampingan pasca pelatihan terdapat 2 proses yang diantaranya: (1) Pendampingan oleh penyuluh dari DKP; (2) Pendampingan oleh fasilitator kelurahan dan kecamatan.

Sedangkan untuk tahapan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan terdapat 2 proses yang dilaksanakan diantaranya pertemuan yang dilakukan secara berkala antar pihak terkait dan monitoring dan evaluasi hasil pendampingan yang dilakukan oleh DKP dan aparat kecamatan. Pemantauan dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya monitoring kegiatan BULO dilapangan. Pemantauan dilakukan selama kegiatan ini dilaksanakan oleh Poktanrong. Beberapa hal yang perlu dipantau ialah mengenai kelengkapan penyaluran sarana dan prasarana produksi, partisipasi masyarakat dan penyuluh, aktifitas budi daya di lapangan.

2. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program BULO

Menurut Pandangan Edwards III (Subarsono, 2010: 93), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam pembahasan atau point ini penulis akan kaitkan dengan pandangan Edwards III bagaimana pola komunikasi dan sumber daya yang ada, disposisi, dan struktur birokrasi dipihak pemerintah dengan SKPD terkait dan masyarakat pada umumnya

di Kelurahan Bonto Makkio dan Kelurahan Tidung, sebagai berikut:

1. Komunikasi

Program BULO yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah program yang harus disampaikan kepada masyarakat secara terintegrasi melalui kecamatan, kelurahan, dan pihak SKPD yang telah ditunjuk.

Program BULO yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar adalah program yang harus disampaikan kepada warga salah satunya melalui pihak kelurahan. Disisi lain pemahaman aparat kelurahan tentang program tersebut perlu dikuasai agar aparat kelurahan dapat menjelaskan apa tujuan dari program BULO tersebut. Namun penyampaian program ini tidak disertai dengan dokumen tata cara pelaksanaan program, yang diterima khususnya Kelurahan Bonto Makkio dan Kelurahan Tidung hanyalah garis besar mengenai program tersebut.

2. Sumber Daya

Ketersediaan jumlah staff yang cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan. Begitupun kegagalan suatu implementasi kebijakan adalah salah satunya disebabkan karena staff tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Pada program BULO sumber daya (penyuluh) yang dimiliki belum tersedia cukup untuk penanganan BULO. Hal ini dapat mengakibatkan implementasi belum terlalu maksimal dikarenakan personil yang bertanggung jawab untuk penyuluhan terdapat saling ketergantungan satu sama lain.

3. Disposisi

Dalam hal kebijakan Program BULO di Kelurahan Tidung dan Kelurahan Bonto Makkio disposisinya atau sikap implemetor belum seutuhnya mendukung dan mendukung dan menjalankan tanggungjawabnya dengan baik karena masih sangat kurangnya pemahaman mereka sebagai pelaksana kebijakan dalam hal ini Lurah atas kebijakan BULO, adanya perbedaan perspektif dari segi pendanaan antara pihak kelurahan dengan instansi sebagai teknis dalam program ini yaitu DKP, dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa program ini tidak mempunyai anggaran tapi swadaya dan ada yang mengatakan program ini ada anggaran yang sudah disediakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedure atau SOP*).

Pada pengimplementasian Program BULO penyampaian tidak disertai dengan dokumen tata cara pelaksanaan program yang diterima khususnya masyarakat melainkan hanyalah garis besar mengenai program tersebut.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program BULO

Keberhasilan suatu program pemerintah terkhusus pada Program

BULO dilihat bagaimana dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran pemerintah, tokoh masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam mendukung Program BULO.

Faktor lain yang turut menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan atau program pemerintah yaitu elemen pendukung. Dalam desain Program BULO keterlibatan elemen-elemen pendukung merupakan kunci keberhasilan dalam implementasinya. Sumber daya pendukung yang terdapat dalam implementasi pemberdayaan masyarakat melalui Program BULO di Kecamatan Rappocini ini diantaranya sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana. Sumber daya manusia yang terlibat dalam implelementasi Program BULO yaitu pemerintah baik ditingkat kecamatan sampai RT dan jajaran SKPD terkait, perusahaan sebagai pihak CSR, dan masyarakat itu sendiri.

Adapun pengimplementasian Program BULO di masyarakat beberapa faktor menjadi penghambat diantaranya ketergantungan masyarakat terhadap pihak pemerintah yang menginginkan pembinaan berulang. Kendala lain yang dihadapi dari sisi pembinaan program ini yaitu merubah mindset/ pola pikir masyarakat perkotaan untuk menjadi masyarakat yang mengerti tentang pertanian perkotaan agak berat. Faktor cuaca menjadi faktor menghambat budidaya cabai sulit tumbuh dan bertahan lama.

PEMBAHASAN

1. Gambaran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Lorong (BULO)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program BULO merupakan kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan lorong dengan budidaya cabai. Hadirnya Program BULO merespon permasalahan yang ada di lorong yang identik dengan muara berkumpulnya penyakit sosial masyarakat, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Subarsono (2010:14),

“Lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu negara akan mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponnya, yakni memasukkan kedalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan”

Menggunakan teori kebijakan oleh Dunn (Wahab, 2015:98) menyebutkan kebijakan sebagai bentuk tindakan yang dibuat oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu kesempatan dan tantangan lingkungan dimana kebijakan diajukan untuk digunakan guna menanggulangi kesulitan atau permasalahan yang terjadi dalam usaha mencapai tujuan atau merealisasikan program atau tujuan yang dikehendaki. Maka

langkah yang diambil oleh pemerintah kota dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Makassar merupakan suatu kebijakan yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan melihat permasalahan dan kondisi lingkungan.

Keberadaan Program BULO pada tataran implementasi perlu adanya payung hukum sebagai dasar fundamental untuk merumuskan sebuah kebijakan (*policy*) dan tertibnya pada tataran implementasi sebuah kebijakan.

Namun pada pelaksanaan Program BULO berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan bahwa Program BULO tidak memiliki Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur tentang program ini, namun hanya berhenti sebagai salah satu turunan dari Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar.

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar, boleh jadi sasaran program ini adalah meningkatkan kapasitas penanganan sampah dan kebersihan lorong dengan rencana strategis yaitu menanamkan budaya bersih dalam masyarakat dan peningkatan kapasitas penanganan sampah, sehingga melahirkan program yaitu Makassar Ta' Tidak Rantasa' dan sebagai turunan melahirkan Program Lorong Garden dan Program BULO

dengan target pembenahan lorong bisa tercapai 80% pembenahan di Tahun 2017 dari 7.520 lorong yang ada di Kota Makassar.

2. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program BULO

Pengimplementasian Program BULO meski mudah dipahami secara abstrak dan seolah-olah dapat dilaksanakan, padahal dalam praktik pelaksanaannya senantiasa menuntut adanya ketersediaan sumber daya atau sumber-sumber kebijakan sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran implementasi kebijakan. Sebagaimana pendapat Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2015:102) mengemukakan bahwa,

“Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan”

Namun berdasarkan pendapat tersebut pada pengimplementasian Program BULO meski mendapat dukungan sarana dan prasarana dari dalam melaksanakan budidaya cabai

akan tetapi terdapat kekurangan sumber daya personil penyuluh yang menyebabkan saling ketergantungan antar penyuluh sehingga penanganan BULO ini sebenarnya belum terlalu maksimal. Selain itu yang menjadi kelemahan pengimplementasian Program BULO yaitu tidak adanya SOP yang memuat pedoman tata cara pelaksanaan program tersebut serta perlunya penetapan capaian jangka pendek dan menengah sehingga program BULO mudah dievaluasi capaiannya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Lorong (BULO)

Dari hasil penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor mempengaruhi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Program BULO yang sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan kegiatan tersebut adalah keterlibatan elemen pendukung dan ketersediaan sarana dan prasarana. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran pemerintah, tokoh masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam mendukung Program BULO. Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi Program BULO yaitu pemerintah baik ditingkat kecamatan sampai RT dan jajaran SKPD terkait, perusahaan sebagai pihak CSR, dan masyarakat kelompok tani lorong (Poktanrong).

Namun dalam proses pengimplementasian Program BULO yang telah dilaksanakan di Kecamatan

Rappocini ternyata masih memiliki kendala seperti kekurangan sumber daya penyuluh dan dalam struktur birokrasi belum tersedianya SOP dari Program BULO. Sejalan dengan salah satu model variabel yang memungkinkan implementasi kebijakan berjalan dengan baik, Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2015:103) menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, lebih jauh dikatakan bahwa sumber daya dimaksud termasuk juga dalam pemanfaatan sumber daya finansial.

Faktor lain, sikap masyarakat yaitu ketergantungan masyarakat terhadap pihak pemerintah hal ini tampak pada masih banyaknya lorong yang menginginkan pembinaan berulang. . Namun sebagaimana yang diungkapkan Ginanjar Kartasmita (Fahrudin, 2011:63) bahwa pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian (*Charity*). Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Berdasarkan pendapat tersebut, seyogyanya setelah program pemberdayaan masyarakat melalui Pogram BULO dilaksanakan dapat menumbuhkan sikap kemandirian masyarakat dalam keberlanjutan program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas*

Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers.

Edi, Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Retika Adhitama

Fathan, Ach. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Etnografi Dan Etnometodologi Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Fahrudin, Adi. 2011. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Keputusan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.

Rakib, Muhammad dan Agus Syam. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Life Skills Berbasis Potensi Lokal Untuk Meningkatkan Produktivitas Keluarga Di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Soppeng*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.6, No.10, 2016. Hal. 97-108.

Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suntoro, Irawan dan Hasan Hariri. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wijayanti, Kurnia., Sjamsiar Sjamsudin., Mochamad Rozikin. 2014. *Upaya Badan Keswadayaan Masyarakat*

(BKM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 10, Hal. 35-40

Wilantara, Rio F dan Susilawati. 2016. *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: PT Refika Aditama

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group